

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

https://drive.google.com/file/d/19qfLVex9GhAHPtxmMN8qILtQd10OqFzI/view?usp=drive_link

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN INFLASI DI DAERAH

Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Sumenep :

1. Hasil survey harga kebutuhan pokok di Pasar Anom dan Pasar Bangkal diperoleh data bahwa terdapat beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga namun juga ada yang tetap bahkan mengalami penurunan.
2. Komoditas penyumbang utama kenaikan Triwulan pertama adalah bawang merah, cabe kecil/rawit, bawang putih, emas perhiasan, beras, telur ayam ras, cabe merah dan tomat.
3. Kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud diatas disebabkan :
 - Adanya peningkatan kebutuhan pokok masyarakat utamanya menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H ;
 - Beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar daerah diantaranya telur ayam broiler/ras dan bawang merah ;
 - Meningkatnya biaya
4. Adanya perbedaan harga kebutuhan pokok antara Pasar Bangkal dan Pasar Anom disebabkan karena penjual di Pasar Bangkal untuk berjualan mereka kulakan terlebih dahulu ke Pasar Anom hal ini disebabkan pedagang besar hanya terpusat di tempat tersebut.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Pengendalian inflasi TPID Kabupaten Sumenep terfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) :

Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi

1. Daerah Internal Pemerintah Kabupaten Sumenep ;
 2. Melakukan peninjauan guna pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung ke pasar anom dan pasar bangkal ;
 3. Menyusun Laporan langkah strategi pengendalian inflasi sebagai bahan telaah staf kepada Bupati ;
 4. Menyelenggarakan Koordinasi dengan kecamatan terkait laporan perkembangan harga bahan pangan pokok masing masing kecamatan ;
 5. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait laporan perkembangan harga bahan pangan pokok pada 2 pasar barometer BPS ;
 6. Menyelenggarakan kerjasama dengan media dalam rangka pemberian informasi tentang rencana aplikatif pengendalian inflasi di Kabupaten Sumenep bagi Masyarakat (*sebagaimana terlampir*).
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kabupaten Sumenep Tahun 2024

1. Analisis Inflasi Kabupaten Sumenep

Kenaikan harga komoditas utama, terutama beras, bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, bensin, rokok kretek filter, dan minyak goreng.

Meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha, yang menyebabkan lonjakan harga.

Ketergantungan pasokan dari luar daerah, terutama untuk telur ayam dan bawang merah.

Meningkatnya biaya produksi, yang berkontribusi terhadap harga akhir barang.

Distribusi tidak merata, menyebabkan perbedaan harga antara Pasar Anom dan Pasar Bangkal.

2. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi

TPID Kabupaten Sumenep menerapkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan langkah-langkah berikut:

Koordinasi antar instansi pemerintah, termasuk dengan kecamatan dan dinas terkait.

Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar utama.

Penyusunan laporan strategi pengendalian inflasi untuk Bupati.

Kerja sama dengan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Pendekatan komprehensif dengan koordinasi lintas sektor.

Pemantauan harga secara langsung membantu memahami dinamika pasar.

Strategi komunikasi dengan media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kekurangan Kebijakan:

Belum terlihat adanya intervensi langsung, seperti operasi pasar atau subsidi bagi komoditas utama.

Ketergantungan pada pasokan luar daerah belum diatasi dengan strategi jangka panjang, seperti penguatan produksi lokal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Inflasi di Kabupaten Sumenep

Rekomendasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Inflasi di Kabupaten Sumenep

Untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Sumenep, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang bisa diperkuat adalah kerja sama antar daerah, selain berbagai langkah lainnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi tambahan:

1. Kerja Sama Antar Daerah untuk Stabilisasi Pasokan

Karena Sumenep masih bergantung pada pasokan komoditas dari luar daerah, kerja sama dengan daerah lain sangat penting. Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

MoU dengan daerah surplus pangan untuk menjamin pasokan komoditas strategis seperti

beras, bawang merah, dan telur ayam.

Sistem perdagangan langsung antar daerah, tanpa perantara yang bisa menaikkan harga.

Sinergi dengan daerah tetangga untuk pengendalian harga dan distribusi bahan pokok agar tidak ada disparitas harga yang tajam.

2. Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, Sumenep perlu memperkuat produksi lokal dengan cara:

Meningkatkan produksi pertanian lokal dengan memberikan insentif, subsidi pupuk, dan teknologi pertanian modern kepada petani.

Penguatan sektor peternakan dan perikanan agar produksi telur, daging, dan ikan dapat memenuhi kebutuhan lokal tanpa harus mengimpor dari luar daerah.

Pengembangan industri olahan pangan lokal agar hasil pertanian bisa disimpan lebih lama dan memiliki nilai tambah.

3. Penguatan Sistem Distribusi dan Infrastruktur Logistik

Salah satu penyebab inflasi adalah distribusi yang tidak efisien. Beberapa langkah yang bisa diambil:

Pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan ke pasar dan sentra produksi agar distribusi lebih lancar.

Pendirian gudang penyimpanan bahan pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat kelangkaan stok.

Penyediaan transportasi logistik murah atau subsidi distribusi bagi komoditas utama.

4. Intervensi Harga dan Operasi Pasar Berkelanjutan

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah perlu melakukan:

Operasi pasar murah rutin, terutama pada periode rawan inflasi seperti menjelang hari besar keagamaan.

Penyediaan subsidi bahan pangan tertentu, misalnya melalui program bantuan sosial atau voucher pangan untuk masyarakat rentan.

Pemantauan dan pengendalian harga di pasar agar tidak terjadi spekulasi harga yang merugikan konsumen.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pasar

Digitalisasi bisa membantu mengontrol inflasi dengan cara:

Pembuatan aplikasi pemantauan harga agar masyarakat dan pedagang bisa melihat harga yang wajar dan menghindari spekulasi.

Pemberdayaan e-commerce lokal untuk memasarkan produk lokal dengan harga yang lebih transparan.

Meningkatkan literasi digital bagi UMKM agar mereka bisa terhubung langsung dengan pasar yang lebih luas.